

## Komparasi Model Pendidikan di Finlandia, Jepang dan Indonesia (Kajian Paradigma Paulo Freire sebagai Pendekatan)

Akmal Rizki Gunawan<sup>1</sup>, Muhamad Resky<sup>2</sup>, Hasna Latifah<sup>3</sup>, Halimatussadiyah<sup>4</sup>,  
Tania Amanda Putri<sup>5</sup>, Alfiah Zahra<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi

Email: <sup>1</sup>[akmalgunawangulen@gmail.com](mailto:akmalgunawangulen@gmail.com), <sup>2</sup>[muhammad.resky@unismabekasi.ac.id](mailto:muhammad.resky@unismabekasi.ac.id)

**Abstract:** *Modernising education is a necessity in the era of globalisation. Modern education is able to prepare students to face increasingly complex global challenges. The challenges of education modernisation that are not immediately addressed can cause various dangers, both for individuals, communities, and nations, such as individual unpreparedness in facing global challenges, unemployment. The purpose of this study is to discuss the importance of education modernisation in the global era, with a focus on comparing education models in developed and developing countries. The research method used is a qualitative method with a literature study approach. The data collected in this study are books and journals that are analysed using the content analysis method. Data analysis was conducted qualitatively through the process of description, reduction, categorisation, and interpretation. The results showed that to face Society 5.0, modernisation of the education model is needed, namely increasing the education budget, the quality of education human resources, developing a positive learning culture, curriculum and learning methods that are relevant to global needs, and utilising technology to improve the quality of learning and access to education. This research has implications for the efforts that need to be made by the government, society and other education stakeholders to overcome the inhibiting factors in the modernisation model in Indonesia.*

**Keywords:** *education; education model; education modernization; technology*

**Abstrak:** Modernisasi pendidikan merupakan suatu keharusan di era globalisasi. Pendidikan yang modern mampu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Tantangan modernisasi pendidikan yang tidak segera diatasi dapat menimbulkan berbagai bahaya, baik bagi individu, masyarakat, maupun bangsa, seperti ketidaksiapan individu dalam menghadapi tantangan global dan pengangguran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pentingnya modernisasi pendidikan di era global, dengan fokus pada perbandingan model pendidikan di negara maju dan berkembang. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses deskripsi, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menghadapi Society 5.0 diperlukan modernisasi model pendidikan yaitu peningkatan anggaran pendidikan, kualitas SDM pendidikan, pengembangan budaya belajar yang positif, kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan global, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses pendidikan. Penelitian ini berimplikasi pada dalam upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk mengatasi faktor penghambat dalam modernisasi model di Indonesia.

**Kata kunci:** model pendidikan; modernisasi pendidikan; pendidikan; teknologi

### PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan di era globalisasi harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini menuntut adanya modernisasi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Modernisasi pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan berbagai inovasi dan perubahan

(Cikka, 2020). Inovasi dan perubahan tersebut dapat mencakup kurikulum, metode pembelajaran, dan sarana prasarana pendidikan. Negara-negara maju telah melakukan modernisasi pendidikan secara intensif untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal ini terlihat dari berbagai indikator pendidikan di negara-negara maju, seperti tingkat partisipasi pendidikan, kualitas hasil belajar, dan daya saing lulusan (Marfiyanti & Nafsiyanti, 2019).

Selama 30 tahun terakhir sistem pendidikan di negara-negara industri telah mengalami reformasi besar-besaran reformasi ini telah membawa fleksibilitas, kemandirian, kreativitas & interaktivitas dalam lingkungan akademik. Integrasi perangkat seluler ke dalam lingkungan akademis telah menghasilkan dampak yang tak tergantikan pada sistem pembelajaran modern. Integrasi pemberangkat seluler dalam pendidikan menghadirkan peluang besar yang membentang dari peningkatan efisiensi hingga aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil (Mesra et al., 2023)

Modernisasi pendidikan merupakan suatu keharusan di era globalisasi. Pendidikan yang modern mampu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Namun, modernisasi pendidikan tidak dapat dilakukan dengan mudah. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik di negara maju maupun berkembang. Persoalan modernisasi pendidikan yang tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan berbagai bahaya, baik bagi individu, masyarakat, maupun bangsa. Bahaya-bahaya tersebut yaitu diantaranya ketidaksiapan individu dalam menghadapi tantangan global. Individu yang tidak memiliki pendidikan yang berkualitas akan sulit untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, rendahnya kualitas SDM (Jumari & Umam, 2022).

Gagalnya sebuah generasi bangsa yang tidak paham akan perkembangan teknologi akan menimbulkan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat (Husain & Kaharu, 2020).. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang berkualitas akibat pemerataan pendidikan oleh pemerintah belum direalisasi dengan baik (Putra, 2019). Problematika dalam menghadapi era berbasis teknologi digita ini berimplikasi pada ketimpangan pemerataan dalam sarana prasarana akan sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan sehingga akan menyebabkan kemunduran bangsa. Bangsa yang tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas akan sulit untuk bersaing di dunia internasional. Tentunya Modernisasi pendidikan merupakan suatu persoalan yang harus ditangani dengan serius. Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan perlu bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan modernisasi pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di dunia internasional (Hidayat, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Montanesa & Firman, bahwa sistem pendidikan antara Indonesia dan Jepang berbeda. Sistem pendidikan di Indonesia dan di Jepang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Saat ini sistem pendidikan di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih karena menduduki peringkat 72 dari 77 negara. Di Indonesia telah lahir banyak ahli ilmu pendidikan yang mampu membawa sistem pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Salah satu cara untuk membawa sistem pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik adalah dengan membandingkannya dengan negara dengan sistem pendidikan yang baik seperti Jepang (Montanesa & Firman, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Marfiyanti dan Nafsiyanti mengemukakan sebab modernisasi yaitu sebuah sudut pandang religius yang didasari oleh keyakinan bahwa kemajuan ilmiah dan budaya modern membawa konsekwensi reaktualisasi berbagai ajaran keagamaan tradisional mengikuti disiplin pemahaman filsafat ilmiah yang tinggi (Marfiyanti & Nafsiyanti, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sya'roni, mengatakan bahwa terdapat empat unsur yang menjadi syarat berdirinya pengajaran dan mestinya menjadi sorotan serius biar pendidikan bisa kerjalan dengan baik, seperti halnya pendidik, peseta

didik, ilmu yang akan diberikan kemudian metode yang digunakan dalam menyampaikan ilmu (Sya'roni, 2021).

Lantas bagaimanakah modernisasi pendidikan di negara berkembang bisa terlaksana dengan baik, tentunya berpijak pada paradigma modernisasi poule Freire. Mengingat keseragaman sejarah antara Paul Freire (Brazil) dan Fazlur Rahman (Indonesia), kedua tokoh besar ini memiliki gagasan modernisasi dalam pendidikan untuk mencerdaskan bangsanya. Artikel ini memusatkan pada kajian komparasi model pendidikan di negara maju dan berkembang berdasarkan paradigm poul Freire. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pentingnya modernisasi pendidikan di era global, dengan fokus pada perbandingan model pendidikan di negara maju dan berkembang. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk mengatasi faktor penghambat dalam modernisasi model pendidikan di negara berkembang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh data melalui dokumen tertulis. Validasi data yang disajikan berdasarkan sumber rujukan yang valid dan kredibel serta berdasarkan fakta-fakta konseptual dan teoretis. Data dianalisis menggunakan beberapa dokumen dalam bentuk buku teks, dan artikel jurnal yang terkait secara langsung dengan model pendidikan di negara maju. Pesatnya perkembangan pendidikan saat ini di dunia maka timbullah berbagai macam studi kasus di berbagai sekolah yang ada di Indonesia, oleh karna itu pendekatan yang diambil dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga cara; (1) Studi literatur dari berbagai buku serta jurnal, (2) Hasil-hasil penelitian terdahulu, (3) Sumber-sumber kepustakaan lain yang relevan.

Analisis data dimulai dari proses deskripsi, reduksi, kategorisasi, interkoneksi dan interpretasi. Data berupa dokumen dan literatur dianalisis secara meta data sampai diperoleh data utama untuk perbaikan kebijakan dalam modernisasi pendidikan. Merujuk pendapat Mirzan dan Purwoko ada beberapa langkah penelitian kepustakaan yaitu; (1) menentukan tujuan yang ingin dicapai; (2) mendefinisikan istilah-istilah penting; (3) menentukan unit yang akan dianalisis; (4) mencari data yang relevan; (5) mengkonstruksi hubungan rasional atau konseptual untuk menjelaskan bagaimana data berhubungan dengan tujuan; (5) merencanakan penentuan data (dokumen); (6) merumuskan pengkodean kategori (Furqan et al., 2020). Langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah: (1) tujuan yang ingin dicapai harus ditentukan terlebih dahulu; (2) mendefinisikan dan menetapkan istilah-istilah penting; (3) menetapkan unit-unit yang akan dianalisis; (4) mencari data yang relevan; (5) pengkodean; (6) analisis data; (7) kesimpulan Instrumen penelitian menggunakan lembar dokumentasi yang berisi judul literatur, pengarang, ringkasan, dan hasil analisis Analisis isi digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat diperiksa kembali berdasarkan konteksnya. Hal itu dilakukan melalui proses pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan pemilihan beberapa makna hingga ditemukan data yang relevan. Untuk menjaga keakuratan proses penelaahan dan mencegah serta mengatasi kesalahan informasi dilakukan pemeriksaan antar-pustaka dan mempertimbangkan komentar para ahli. Analisis data dilakukan berdasarkan pendapat Miles dan Huberman yang fokus pada analisis isi (Haryati & Khoiriyah, 2017) terus menerus sampai data dianggap cukup. Tahapan analisis yang dilakukan adalah analisis selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data dengan proses sebagai berikut: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses deskripsi, reduksi, kategorisasi, interkoneksi dan interpretasi (Haryati & Khoiriyah, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diskursus Modernisasi menurut para Ahli

Ilmu Pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni Ilmu dan Pendidikan yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka disebutkan, bahwa Ilmu adalah Pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Arti dari Pendidikan adalah Proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Para ahli juga memberikan beragam pendapat mengenai pengertian ilmu pendidikan. Menurut Imam Barnadib ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Pendidikan memiliki corak teoritis dan praktis. Bercorak teoritis artinya normatif atau menunjukkan standar nilai tertentu. Sedangkan bercorak praktis maksudnya bagaimana model pembelajaran dalam pendidikan harus dilaksanakan (Barnadib, 1973).

Menurut Arend dalam Humaeroh ketika ingin memilih suatu model pembelajaran terdapat dua alasan penting yang harus diperhatikan. Pertama, model memiliki fungsi sebagai sebuah sarana komunikasi yang penting. Kedua, model pada hakikatnya memiliki sebuah arti yang lebih luas dibandingkan dengan strategi, teknik, pendekatan dan metode (Humaeroh et al., 2021). Berbeda dengan Hamidah yang mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang menggambarkan sebuah prosedur sistematis dalam mengorganisir siswa ketika belajar agar tercapainya tujuan belajar tertentu (Hamidah, 2018). Model pembelajaran bisa dikatakan sebagai suatu pedoman dalam merencanakannya pembelajaran di kelas maupun praktik kelas. Selain itu Model pembelajaran juga mencakup segala pendekatan-pendekatan pembelajaran yang hendak digunakan kepada siswanya, diantaranya; pengorganisasian kelas, tahap-tahap ketika hendak melakukan kegiatan belajar mengajar, tujuan tujuan pengajaran, dan lingkungan pembelajaran (Pangastuti et al., 2021).

Tentunya model pembelajaran perlu adanya modernisasi, karena hakikatnya kontekstualisasi dari ilmu pendidikan berfokus pada masalah-masalah umum yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Paulo Freire berpendapat tentang modernisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan dan kebodohan. Tentunya ilmu pendidikan menurut para ahli di atas perlu adanya modernisasi, karena hakikatnya kontekstualisasi ilmu pendidikan berfokus pada masalah-masalah umum yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Paulo Freire berpendapat tentang modernisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan dan kebodohan (Paulo Freire, 2000).

Pendidikan harus mampu mengembangkan potensi manusia secara holistik, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Dalam konteks modernisasi pendidikan, menurut Freire terdapat tiga paradigma dalam modernisasi pendidikan yaitu modernisasi pendidikan harus dilakukan dengan cara yang humanis dan transformatif, modernisasi pendidikan harus dibangun atas dasar dialog dan modernisasi pendidikan harus berorientasi pada tindakan. Modernisasi pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, tetapi juga harus berfokus pada pengembangan potensi manusia secara holistik dan menciptakan perubahan sosial. Modernisasi pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada perubahan di level teori, tetapi juga harus mampu menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat (Paulo Freire, 1968).

Menurut Freire pengembangan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara holistik. Kurikulum pendidikan harus mencakup materi-materi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan

keterampilan hidup. Penggunaan metode dalam implementasi kurikulum harus berorientasi pada dialog untuk mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpikir kritis, selain itu sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan mendukung proses pembelajaran yang efektif (Paulo Freire, 1999). Menurut Freire, proses pendidikan yang berorientasi hanya kepada guru semata akan menciptakan “gaya antagonism atau dikenal dengan istilah *“banking of concept education”*”. Maka yang dimaksud oleh konsep pendidikan oleh Paulo Freire adalah suatu *“pedagogy of liberation”* yakni proses pendidikan ‘hadap masalah’ *problem posing of education*. Paulo Freire menolak gagasan *“banking of concept education”* yaitu diantaranya adalah (1) Guru mengajar, murid belajar (2) Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa (3) Guru berfikir, murid dipikirkan (4) Guru bicara, murid mendengarkan (5) Guru mengatur, murid diatur (6) Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti (7) Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya (8) Guru memilih apa yang diajarkan, murid menyesuaikan diri (9) Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid (10) Guru adalah subyek proses belajar, murid obyeknya (Paulo Freire, 2000). Antitesa gagasan *“banking of concept education”* sangat ditolak oleh Freire karena sejatinya pendidikan itu harus berorientasi pada dialog antara guru dengan murid (Freire & Macedo, 1987).

### **Potret Pendidikan di Negara Finlandia**

Pada tahun 1980, pendidikan di Finlandia tidak lebih baik dibandingkan di Indonesia, namun dalam 30 tahun terakhir, negara ini telah mencapai kemajuan yang sangat pesat dalam profesi guru (Muryanti & Herman, 2021). Finlandia telah meningkatkan pelatihan dalam beberapa hal, khususnya di tingkat sekolah dasar. Hal ini mencakup pendidikan gratis bagi semua guru dan dukungan pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan. Alumni ahli proyek pengajaran bahkan alumni pengajar yang bergelar doktor merupakan standar persiapan para pendidik di sekolah dasar (Muryanti & Herman, 2021). Sistem pendidikan Finlandia mampu membuahkan hasil yang sangat sukses dalam pengembangan pendidikan berkualitas tinggi karena dilandasi oleh kesetaraan, kerjasama, tanggung jawab, dan budaya (Muryanti & Herman, 2021). Seluruh Finlandia telah berjaya dalam hal memberikan bantuan pendidikan dan fasilitas bagi penduduknya dan telah menjadi negara yang memberikan keseragaman dalam bidang pendidikan.

Tingkat pemerataan pendidikan yang tinggi, atau pendidikan untuk semua, dan hasil literasi yang luar biasa telah dicapai oleh sistem pendidikan Finlandia (Hatip & Setiawan, 2022). Salah satu jenis dukungan adalah kenyataan bahwa sekolah-sekolah di Finlandia didanai publik mulai dari sekolah dasar hingga universitas (Haltia, 2022). Hal ini menjamin seluruh warga Finlandia menerima pendidikan. Mewujudkan pendidikan tingkat tinggi bagi semua orang adalah tujuan utama sistem pendidikan Finlandia. Memastikan akses yang adil terhadap pendidikan terbaik bagi semua warga Finlandia dengan bakat, kompetensi, dan keterampilan terbaik adalah tujuan dari upaya ini. Finlandia telah mengembangkan sistem pendidikan inklusif yang mencakup fitur-fitur seperti pendidikan gratis, makan siang gratis di sekolah, dan pendidikan kebutuhan khusus yang diterapkan secara konsisten. Tujuan pengembangan pendidikan dasar di Finlandia adalah untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang gender, kelas, status sosial, atau latar belakang etnis, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Tujuan utama sistem pendidikan adalah untuk memajukan kesetaraan pendidikan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendukung (Sundqvist & Ström, 2019).

Guru di Finlandia hanya menghabiskan empat jam sehari untuk mengajar siswa dan dua jam seminggu untuk pengembangan pribadi. Finlandia, guru bekerja rata-rata 592 jam per tahun, dibandingkan dengan 703 jam di OECD. Finlandia, guru terutama menggunakan

waktu luang mereka untuk membantu siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Rencana pembelajaran individual akan diberikan kepada siswa yang membutuhkan dukungan lebih dan akan ditempatkan di ruang kelas yang berbeda. Sistem pendidikan Finlandia memastikan tidak ada siswa yang tertinggal dalam studinya dengan cara ini. Mereka melakukan tindakan ini dengan sangat elegan. Menurut, “siswa istimewa adalah siswa yang selama menempuh pendidikannya tidak pernah mendapat perhatian khusus” adalah sebuah pepatah di Finlandia (Absawati, 2020).

Guru di Finlandia memodelkan responsive teaching strategi dan aktivitas pengajaran yang responsif, di mana mereka menggunakan aktivitas dan strategi khusus yang dapat digunakan oleh guru prapelayanan dalam pekerjaan mereka di masa mendatang, seperti permainan susunan pemain, diskusi dan refleksi kelompok, perilaku guru yang responsif dan sikap, di mana mereka menciptakan open suasana kelas yang terbuka, menunjukkan respect and rasa hormat dan sikap tegas, serta menunjukkan ing kepedulian care yang tulus kepada semua siswa. Mereka juga memodelkan responsive learning lingkungan belajar yang responsif, di mana mereka menciptakan perasaan aman melalui latihan dan diskusi kelompok kecil, menggunakan pendekatan integrated approach pembelajaran yang terintegrasi (Acquah et al., 2019).

Meski penghasilannya hanya 3400 euro sebulan, atau 42 juta rupiah, guru di Finlandia sangat dihargai di bidangnya. Hal ini juga didukung oleh praktik perekrutan guru yang sangat ketat di Finlandia, yang telah mengangkat profesi mengajar menjadi karier yang terhormat (Jenset et al., 2018). Sebagai perbandingan, di Finlandia, calon guru berasal dari 10 siswa terbaik di kampus, namun akan menjalani penyaringan yang lebih ketat dibandingkan di Amerika, di mana 47% guru berasal dari 1/3 siswa terbawah (akademik). Finlandia, menjadi guru adalah pekerjaan yang sangat menarik dan menuntut. Bahkan dalam penyusunan dan modifikasi kurikulum, guru memegang pengaruh yang signifikan (Daud, 2020).

Anggaran pendidikan Finlandia memang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di Eropa. Pemerintah Finlandia menyediakan anggaran 5.200 Euro atau sekitar Rp 70 juta untuk setiap siswa per tahun. Leo Pahkin, konselor pendidikan dari Badan Pendidikan Nasional Finlandia menyebutkan, setiap tahun ada sekitar 52.000 murid yang masuk sekolah dasar. Dengan demikian, anggaran yang disediakan pemerintah untuk murid pendidikan dasar mencapai Rp 3,64 triliun per tahun (Absawati, 2020).

Sistem pendidikan di Finlandia juga berkeyakinan “pendidikan yang baik tidak terletak pada hasil yang baik”, Oleh karena itu “standardized test” hanya sebagai patokan namun bukan landasan. Standardize test hanya menghabiskan biaya negara bermilyar-milyar setiap tahun untuk membuat soal ujian, namun hanya beberapa individu saja yang bermutu. Setiap siswa tidak memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan tes yang sama. Sebagai contoh ketika melakukan “medical checkup” tidak perlu menyedot seluruh darah yang ada di badan untuk mengetahui penyakit apa yang diidap, tetapi cukup dengan mengambil beberapa tetesan saja.

Demikian juga dalam lingkup pendidikan, tidak perlu mengetes seluruh siswa tapi cukup dengan “randomized sample” untuk mewakili, namun dengan prosedur dan sistem yang valid. Sistem pendidikan Finlandia sangat menitikberatkan bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Finlandia optimis bahwa hasil terbaik hanya dapat dicapai bila lebih memperhatikan siswa yang kurang daripada terlalu menekankan target kepada siswa yang unggul. Dengan demikian, tidak ada anak-anak yang merasa tertinggal. Finlandia terbukti mampu mencetak anak-anak berprestasi di bidang akademik tanpa harus mengikuti standarisasi akademik konvensional.

## Potret Pendidikan di Jepang

Pendidikan di Jepang ada yang formal yaitu pendidikan di Sekolah, selanjutnya ada juga pendidikan yang berbasis moral yaitu merupakan sistem pendidikan yang bangun dari rumah dan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah pendidikan yang muncul dari masyarakat itu sendiri yang biasanya juga disebut pendidikan seumur hidup/ long life learner (Sahban and SE 2018). Di Jepang wajib belajar mulai dari usia 6 tahun hingga usia 15 tahun. Setiap keluarga yang memiliki anak pada rentang usia 6-15 tahun akan diberikan pemberitahuan untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah (Fittryati 2020). Di Jepang juga ada sekolah negeri yang biasanya disebut koritsu gakko. Sekolah negeri itu dikepalai atau diselenggarakan oleh pemerintah kota atau yang disebut prefektur. Tetapi ada beberapa juga sekolah yang dikelola oleh prefektur dan pemerintah pusat. Untuk sekolah swasta disebut juga dengan shiritsu gakko yang diselenggarakan oleh badan hukum (Novi Handayani 2017). Di sekolah negeri biasanya siswa mulai masuk mulai dari hari senin hingga hari jumat, sedangkan sekolah swasta hingga hari sabtu. Di sekolah Jepang biasanya membagi setahun ajaran menjadi tiga caturwulan dan dibagi atas tiga musim, yaitu musim gugur/ fall, musim salju/ snow serta musim panas/ summer yang waktunya cenderung lama dan panjang. Di Jepang juga ada Taman Kanak-kanak yang biasanya disebut dengan youchien, ada juga sekolah hoikuen. Perbedaan antara youchien dengan hoikuen adalah apabila youchien jam sekolahnya mulai pukul 08.50-13.30, sedangkan youchien mulai dari 07.00-19.00 waktunya lebih lama dan lebih panjang, youchien diperuntukkan untuk anak-anak yang orangtuanya bekerja. Untuk anak-anak yang ingin dimasukkan ke youchien harus ada surat keterangan bahwa kedua orangtua bekerja (Montanesa & Firman, 2021).

Kurikulum yang dipakai oleh Sekolah di Jepang adalah kurikulum yang telah distandarkan secara nasional. Mata pelajaran yang distandarkan secara nasional antara lain bahasa Jepang, Bahasa Inggris, Matematik, Sejarah, Olah Raga, Pendidikan Jasmani, Keterampilan dan Kesenian, Science, Integrated Course, dan Home Room. Walaupun begitu, setiap sekolah di masing-masing Prefektur mempunyai kebebasan untuk menyusun kurikulum sekolah. Jadi untuk setiap daerah, kurikulum di mata pelajaran pilihan bisa saja berbeda. Pelajaran pilihan ditekankan pada jenjang kelas 2 dan 3 di mana jumlah kredit per jenjang rata-rata 30. Kurikulum sekolah di Jepang meliputi tiga aspek yaitu, subjects (kamoku), pendidikan moral (doutouku;kyouiku) dan extra-kurikuler.

Sistem sekolah modern Jepang dimulai pada tahun 1872. Hukum Pendidikan dan Pendidikan Sekolah diberlakukan pada tahun 1947 dimana pada waktu itu sistem 6-3-3-4-tahun pendidikan sekolah diterapkan dengan tujuan untuk mewujudkan prinsip kesempatan yang sama untuk pendidikan.

### TK (Youchien)

Anak-anak yang telah berusia tiga tahun ke atas dapat mengikuti pendidikan di taman kanak-kanak (TK), baik negeri maupun swasta. TK ada juga yang merangkap langsung sebagai tempat penitipan anak yang dapat menerima anak untuk dititipkan dari usia bayi hingga menjelang masuk sekolah dasar dari pukul delapan pagi hingga pukul enam sore. TK bertujuan membantu anak-anak pra-sekolah mengembangkan pikiran dan tubuh mereka dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan edukatif. TK melayani anak-anak berusia 3, 4 dan 5. Tujuan pendidikan di Taman Kanak-Kanak yang berpusat pada emosi, sikap, dan lain-lain adalah sebagai dasar bagi anak-anak untuk merangkul semangat hidup diharapkan bisa dikembangkan pada saat mereka meninggalkan Taman Kanak-Kanak, dengan mengintegrasikan aspek perkembangan anak: kesehatan (fisik dan mental), hubungan manusia (hubungan antara anak dan orang lain), lingkungan, bahasa, dan ekspresi (perasaan dan emosi). Dalam pelaksanaannya, anak-anak diajarkan berbagai kebiasaan-kebiasaan misalnya: kebiasaan dalam makan, membuang sampah, bermain dan membereskan mainan,

disiplin dalam hal membaca, berolah raga, mengucapkan salam, bagaimana bekerjasama dengan teman, berani tampil di depan orang banyak, bagaimana bersikap dengan orang tua, kakek, nenek, bersahabat dengan alam, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya dengan pendekatan anakanak yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan (Irawati & Maulidiyah, 2021).

### **Sekolah Dasar (Shougakkou)**

Semua anak-anak yang telah mencapai usia 6 tahun wajib untuk mengikuti sekolah dasar selama enam tahun. Sekolah dasar bertujuan untuk memberikan pendidikan umum dasar kepada anak-anak usia 6 sampai 12 tahun sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisik mereka. Anak-anak memasuki sekolah dasar (shougakkou) pada bulan April setelah ulang tahun ke-6 dan akan belajar di tingkat ini selama enam tahun. Mata pelajaran yang ada di sekolah dasar Jepang berdasarkan kurikulum dari kementerian pendidikan adalah bahasa Jepang (kokugo), aritmatika (sansuu), IPA atau science (rika), kebiasaan hidup (seikatsu), musik (ongaku), menggambar dan kerajinan (zuga kousaku), perekonomian keluarga (katei), pendidikan fisik (taiiku), pendidikan moral (doutoku), studi lingkungan hidup, aktivitas khusus, dan studi terapan. Di sekolah Jepang anak-anak lebih banyak belajar dari eksperimen dan pengamatan sehingga anak-anak mengerti dan memahami tidak hanya teori dan tidak mengandalkan hafalan.

Anak-anak diajak memahami setiap materi dengan pengalaman mereka. Selain itu, hampir semua kegiatan sekolah dilakukan anak-anak dengan berkelompok. Mereka bekerja sama dalam kelompok. Dengan metode ini diharapkan anak-anak akan terlatih untuk kerja sama, toleransi, berpikir kritis, dan saling membantu antara anak Sistem Pendidikan: Pendidikan Karakter Berbasis Pembiasaan bukan Hafalan Jepang 387 yang pandai dan kurang pandai untuk menyelesaikan tugas. Perbedaan nyata terlihat juga pada mata pelajaran seikatsu (kebiasaan hidup). Mata pelajaran ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak dengan cara hidup mandiri sehari-hari. Daripada mulai mengajarkan IPA atau IPS, Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-anak yang baru menyelesaikan pembelajaran di TK-nya, serta lebih difokuskan pada kegiatan bermain daripada belajar di dalam kelas. Pelajaran bahasa Jepang dan berhitung diajarkan lebih banyak dibandingkan pelajaran lainnya. Pendidikan olah raga juga menjadi mata pelajaran yang diajarkan dalam jumlah yang melebihi mata pelajaran selain bahasa dan berhitung. Sekolah-sekolah agama diperkenankan mengajarkan agama (Kristen, Buddha, Sinto) sebagai bagian dari pendidikan moral. Selain pendidikan akademik, pendidikan estetika berupa musik dan menggambar juga diajarkan dalam porsi besar (Montanesa & Firman, 2021).

### **Pendidikan Menengah**

Anak yang telah berusia enam tahun dapat masuk sekolah dasar pada 1 April dan belajar selama enam tahun. Setelah tamat dari Sekolah Dasar dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama selama tiga tahun. Pendidikan wajib sembilan tahun gratis atau bebas biaya bagi seluruh murid termasuk siswa asing. Sekolah Menengah Atas terbagi dua yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) umum dan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMAK). SMP dan Sekolah Berkebutuhan Khusus (tingkat dasar dan menengah) negeri bebas dari biaya pendidikan. Pada semua level tingkatan tidak dikenal adanya sistem perangkingan di kelas dan tidak ada siswa yang tinggal kelas. Sistem evaluasi pun diberikan tidak dalam bentuk angka tapi dalam bentuk grade dan verbal, sesuai dengan tingkatan kemampuan yang diharapkan. Contoh rating system yang diberikan adalah: “3” untuk working above expectation or grade level, “2” untuk working at grade level expectation dan “1” untuk working below expectation/or grade level.

### **Sekolah Menengah Pertama (Chugakkou)**

Semua anak-anak yang telah menyelesaikan sekolah dasar wajib untuk belajar di sekolah menengah selama tiga tahun sampai akhir tahun ajaran di mana mereka mencapai usia 15. Sekolah menengah pertama wajib untuk anak-anak antara usia 12 dan 15 di mana di sekolah ini diberikan pendidikan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan mental dan fisik mereka, atas dasar pendidikan yang diberikan di sekolah dasar.

#### **a. Sekolah Menengah Atas (Koto-Gakkou)**

Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah dasar dan menengah pertama dapat melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas. Siswa biasanya harus mengambil ujian untuk masuk sekolah menengah atas. SMA ini ada tiga pilihan program yaitu program sekolah penuh (full-time), paruh waktu (part-time) dan korespondensi. Program sekolah penuh berlangsung selama tiga tahun, sedangkan program paruh waktu dan korespondensi selama tiga tahun atau lebih. Program paruh waktu dan korespondensi ditujukan untuk pekerja muda yang ingin melanjutkan studi menengah atas mereka dengan cara yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Semua program ini akan mendapatkan ijazah atau sertifikat pendidikan menengah atas. Dalam hal isi pengajaran yang diberikan, SMA dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: umum, program khusus dan terpadu (Irawati & Maulidiyah, 2021).

#### **b. Secondary Schools (Chuto-kyoiku-gakkou)**

Pada bulan April 1999, tipe baru sekolah pendidikan menengah enam tahun, yang disebut “Sekolah Menengah” diperkenalkan ke sistem sekolah Jepang. Sekolah menengah mengkombinasikan pendidikan sekolah menengah atas dan pertama dalam rangka memberikan pendidikan SMP, pendidikan umum dan khusus menengah atas sampai 6 tahun. Pada prakteknya, pendidikan 3 tahun pertama sama dengan pendidikan yang diberikan SMP dan 3 tahun berikutnya sama dengan yang diberikan pada SMA.

#### **c. Sekolah untuk Pendidikan Kebutuhan Khusus (Tokubetsu-ShienGakkou)**

Pendidikan untuk anak dengan kebutuhan khusus bertujuan memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Sekolah ini terdiri dari empat tingkatan, yaitu TK, SD, SMP dan SMA (SD dan SMP adalah pendidikan wajib). Sistem sekolah sekarang memungkinkan sekolah untuk menerima beberapa jenis penderita cacat sejak tahun 2007. Implementasi dari kebijakan ini sudah menyebar ke seluruh negeri. Pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus disediakan juga di sekolah reguler, di mana kelas khusus yang kecil ini diperuntukkan buat anak-anak yang mempunyai cacat ringan (Irawati & Maulidiyah, 2021).

### **Potret Pendidikan di Indonesia**

Model pendidikan di negara berkembang umumnya berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan agar semua anak di negara tersebut dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, model pendidikan di negara berkembang juga menekankan pada pengembangan keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung

kebijakan sistem pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang (UU) tahun 1945 dan UU pemerintah dalam kebijakan pendidikan UU Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003. Pada UU tahun 1945 pasal 31 setelah diamandemen yaitu: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat.

Sistem pendidikan di Indonesia telah melaksanakan kurikulum 2013 yang bereformasi dalam mempertahankan karakteristik peserta didik (Baswedan, 2014). Namun dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi sumber daya manusia sesuai dengan bidang atau kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian baru-baru ini Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, memberikan terobosan baru dalam mengatasi kualitas pendidikan dan pembelajaran di Indonesia yaitu melalui program merdeka belajar (Prameswari, 2020).

Berdasarkan hasil analisa yang diutarakan oleh Hafidah, pendidikan di Indonesia memiliki berbagai prestasi dan tantangan. Beberapa prestasi penting termasuk peningkatan akses dan angka partisipasi pendidikan, serta pengembangan kualitas pendidikan melalui perbaruan kurikulum dan pencapaian tingkat kualitas yang tinggi oleh beberapa sekolah dan perguruan tinggi. Namun, masih terdapat tantangan terkait kurangnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, krisis ekonomi yang memengaruhi biaya pendidikan, rendahnya kompetensi guru, dan masalah kekerasan di sekolah. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki mutu pendidikan, termasuk peningkatan anggaran pendidikan dan perbaikan kurikulum serta kualitas guru (Hafidah & Sunardi, 2023).

Pendidikan Indonesia lebih cenderung mengutamakan pembangunan sikap sosial dan religius dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila kesatu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, didakan sila tersebut menunjukan bahwa Indonesia sangat mengedepankan sikap spiritual dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tidaklah diragukan bahwa negara Indonesia dapat dikatakan negara yang paling religius setelah negara Pakistan.

### **Faktor Penghambat Modernisasi Model Pendidikan di Negara Berkembang**

Faktor penghambat dalam modernisasi model pendidikan di negara berkembang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu:

1. Kurang memadainya anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam modernisasi pendidikan. Anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung berbagai inovasi dan perubahan dalam pendidikan, seperti pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang modern, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Negara berkembang umumnya memiliki anggaran pendidikan yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, tingginya beban utang, dan prioritas pembangunan yang lain. Anggaran pendidikan yang terbatas dapat menghambat modernisasi pendidikan, karena tidak dapat mendukung berbagai inovasi dan perubahan yang diperlukan (Elvira, 2021).
2. Kualitas SDM pendidikan yang rendah. Guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan modernisasi pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang keilmuan, pedagogik, dan profesional. Negara berkembang umumnya memiliki kualitas SDM pendidikan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional, rendahnya kesejahteraan, dan budaya birokrasi yang tidak mendukung. Kualitas SDM pendidikan yang rendah dapat

menghambat modernisasi pendidikan, karena sulit untuk menerapkan kurikulum dan metode pembelajaran yang modern (Nizar, 2020).

3. Budaya masyarakat yang masih tradisional. Budaya masyarakat yang masih tradisional dapat menghambat modernisasi pendidikan. Misalnya, budaya yang masih mengutamakan pendidikan formal dapat menghambat pengembangan pendidikan non-formal dan informal. Negara berkembang umumnya memiliki budaya masyarakat yang masih tradisional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses informasi, dan kuatnya pengaruh agama dan adat istiadat. Budaya masyarakat yang masih tradisional dapat menghambat modernisasi pendidikan, karena sulit untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat (Fatimah & Marini, 2022).

Faktor lainnya yang menghambat modernisasi model pendidikan yaitu faktor eksternal, diantaranya yaitu:

1. Globalisasi. Globalisasi membawa berbagai tantangan dan perubahan bagi pendidikan di negara berkembang. Misalnya, globalisasi menuntut pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di dunia internasional. Negara berkembang umumnya belum siap menghadapi tantangan global. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya akses pendidikan, dan kurangnya dukungan pemerintah. Globalisasi dapat menghambat modernisasi pendidikan, karena sulit untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di dunia internasional.
2. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga menuntut pendidikan untuk melakukan perubahan. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses pendidikan. Negara berkembang umumnya belum siap menghadapi perkembangan teknologi (Sya'roni, 2021). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya akses teknologi. Perkembangan teknologi dapat menghambat modernisasi pendidikan, karena sulit untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses pendidikan (Angkotasan & Watianan, 2021).

Upaya mengatasi faktor penghambat dalam modernisasi model pendidikan di negara berkembang, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Upaya yang pertama yaitu pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan agar dapat mendukung berbagai inovasi dan perubahan dalam pendidikan (Angkotasan & Watianan, 2021; Fatimah & Marini, 2022). Peningkatan anggaran pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai sumber, seperti pajak, pinjaman, dan bantuan luar negeri. Upaya kedua yaitu pemerintah perlu melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas SDM pendidikan, seperti pelatihan guru, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, dan pengembangan pendidikan profesi guru. Program-program tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi guru. Upaya ketiga yaitu mengembangkan budaya belajar yang positif. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan budaya belajar yang positif di masyarakat, seperti sosialisasi pentingnya pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya keempat yaitu pemerintah perlu mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan global. Sebagaimana lahirnya kurikulum merdeka belajar kampus merdeka dan kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai organisasi baik itu keagamaan maupun kemasyarakatan. Upaya

selanjutnya yang kelima yaitu pemerintah perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses pendidikan. Pemanfaatan teknologi dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam penggunaan teknologi. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan teknologi. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing (Adha et al., 2019).

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya modernisasi pendidikan di era globalisasi, dengan fokus pada perbandingan model pendidikan di negara maju dan berkembang. Rekomendasi untuk mengatasi faktor penghambat modernisasi model pendidikan di negara berkembang termasuk peningkatan anggaran pendidikan, kualitas SDM pendidikan, pengembangan budaya belajar yang positif, kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan global, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses pendidikan. Perbandingan sistem pendidikan di Finlandia dan Jepang, mampu menjawab serta tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi Society 5.0.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absawati, H. (2020). Telaah Sistem Pendidikan Finlandia : Penerapan Sistem Pendidikan Terbaik Dunia Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Elementary : Kajian Teori Dan Hasil Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar*, 3(2).
- Acquah, E. O., Szelei, N., & Katz, H. T. (2019). *Using modelling to make culturally responsive pedagogy explicit in preservice teacher education in Finland*. <https://doi.org/10.1002/berj.3571>
- Adha, M. A., Gordisona, S., Ulfatin, N., & Supriyanto, A. (2019). Analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 145–160.
- Angkotasana, S., & Watianan, S. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAMPUS STIA ALAZKA AMBON. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 4(2). <https://doi.org/10.30598/komunitasvol4issue2page42-50>
- Barnadib, I. (1973). *A Study of International Education Resources in the Institutes of Teacher Education and Educational Sciences in Java, Indonesia*. New York University.
- Cikka, H. (2020). KONSEP-KONSEP ESENSIAL DARI TEORI DAN MODEL PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2), 64–69. <https://doi.org/10.56488/scolae.v3i2.81>
- Daud, R. M. (2020). Sistem pendidikan Finlandia suatu alternatif sistem pendidikan Aceh. *A-Raniry*, 8(2), 21. <https://doi.org/10.22373/pjp.v8i2.6226>
- Elvira, E. (2021). Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan dan Cara Mengatasinya (Studi pada: Sekolah Dasar di Desa Tonggolobibi). *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 16(2). <https://doi.org/10.56338/iqra.v16i2.1602>
- Fatimah, F., & Marini, M. (2022). Faktor Penghambat Harmonisasi Masyarakat Banjar pada Budaya Sungai dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Budaya.

- Journal of Moral and Civic Education*, 6(1).  
<https://doi.org/10.24036/8851412612022625>
- Feire, P., & Macedo. (1987). *Donaldo. Literacy: Reading the Word & the World*. Routledge: London.
- Freire, Paulo. (1968). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Heder.
- Freire, Paulo. (1999). *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan terj: Agung Prihantoro*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Poulo. (2000). *Pendidikan Kaum Tertindas. Terj. Sudirman*. Jakarta: LP3ES.
- Furqan, M. H., Yanti, S., Azis, D., Kamza, M., & Ruslan. (2020). Content Analysis of the Value of Love for the Motherland (Nationalism) in Geography Curriculum Subject Materials. *Jurnal Serambi Ilmu*, 21(1), 48–63.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32672/si.v21i1.1882>
- Hafidah, R., & Sunardi. (2023). Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Aliran Pendidikan (Konsep dan Praktik). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1335–1345.  
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i3.4987>
- Haltia, N. (2022). *The vocational route to higher education in Finland: Students' backgrounds, choices and study experiences*.  
<https://doi.org/10.1177/1474904121996265>
- Hamidah, D. (2018). KONSEP MANAJEMEN KELAS. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 7(1), 67–69. <https://doi.org/10.37755/jsap.v7i1.130>
- Haryati, T., & Khoiriyah, N. (2017). Analysis of character value contents in Pancasila and citizens education textbooks in class VII junior high school. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21831/jpk.v7i1.15493>
- Hatip, A., & Setiawan, W. (2022). Eksplorasi Pendidikan Finlandia Sebagai Lesson Learnt untuk Pendidikan Indonesia. *Center of Education Journal (CEJou)*, 3(01), 1–16.  
<https://doi.org/10.55757/cejou.v3i01.83>
- Hidayat, A. (2018). KESENJANGAN SOSIAL TERHADAP PENDIDIKAN SEBAGAI PENGARUH ERA GLOBALISASI. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).  
<https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.400>
- Humaeroh, S., Abdulatif, S., Winarti, W., & Windayana, H. (2021). Pedagogik Kritis dalam Membangun Pendidikan Humanis. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 4(3), 174–182. <https://doi.org/10.31004/aulad.v4i3.194>
- Husain, R., & Kaharu, A. (2020). Menghadapi Era Abad 21: Tantangan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.527>
- Irawati, H., & Maulidiyah, A. (2021). Belajar Pendidikan Dasar pada Sekolah di Jepang. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1).  
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1922>
- Jenset, I. S., Klette, K., & Hammerness, K. (2018). Grounding Teacher Education in Practice Around the World : An Examination of Teacher Education Coursework in Teacher Education Programs in Finland , Norway , and the United States. *Journal of Teacher Education*, 69(2), 184–197. <https://doi.org/10.1177/0022487117728248>
- Jumari, J., & Umam, K. (2022). ERA SOCIETY 5.0: SUATU TANTANGAN BAGI

- PENDIDIKAN ISLAM KEKINIAN. *Journal of Islamic Education and Pesantren*, 2(2). <https://doi.org/10.33752/jiep.v2i2.3790>
- Marfiyanti, & Nafsiyanti, H. (2019). PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MODERNISASI. *Mau'izhah*, 9(2). <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v9i2.32>
- Mesra, R., Pratiwi, D., Handayani, R., Wiguna, I. B. A. A. M. S., erdinandus Sampe, Fransiska Atrik Halim, Mayasari, Norbertus Tri Suswanto Saptadi, H. P., Ridhani, J., Munandar, H., Tandirerung, V. A., Ham, H., & Aina, M. (2023). *Teknologi Pendidikan*. Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=FBW\\_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA199&dq=pendidikan+di+negara+maju&ots=mCINVBuYrg&sig=MRoI3VHmJXJewRj3ZD7ilNR96BM&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pendidikan+di+negara+maju&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=FBW_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA199&dq=pendidikan+di+negara+maju&ots=mCINVBuYrg&sig=MRoI3VHmJXJewRj3ZD7ilNR96BM&redir_esc=y#v=onepage&q=pendidikan+di+negara+maju&f=false)
- Montanesa, D., & Firman, F. (2021). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Jepang. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 174–179. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.246>
- Muryanti, E., & Herman, Y. (2021). Studi Perbandingan Sistem Pendidikan Dasar di Indonesia dan Finlandia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1696>
- Nizar, M. (2020). Madrasah Diniyah dan Pesantren sebagai Penyeimbang Modernitas. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.32533/04102.2020>
- Pangastuti, R., Ahrori, M., & Afiah, P. (2021). Manajemen Pembelajaran dalam Meningkatkan Kreativitas Guru di Satuan Paud Sejenis (SPS) Puspa Giri II Dahanrejo Gresik. *Jurnal Kependidikan Islam*, 11(2), 240–251. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2021.11.2.240-251>
- Putra, P. H. (2019). Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02). <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i02.458>
- Sundqvist, C., & Ström, K. (2019). The three-tiered support system and the special education teachers ' role in Swedish-speaking schools in Finland. *European Journal of Special Needs Education*, 00(00), 1–16. <https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1572094>
- Sya'roni, A. (2021). Model Pendidikan Islam Bercorak Teknologi di Daar En-Nisa Islamic School. *Rayah Al-Islam*, 5(01), 79–97. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i01.388>